



► DANA KELURAHAN

Lurah Tunggu Kejelasan PP

JOGJA—Rencana pengucuran dana kelurahan tahun depan dinilai positif. Namun hingga kini pihak kelurahan masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait dengan dana tersebut.

Lurah Terban Anif Luhur Kurniawan menilai sebelum benar-benar direalisasikan pihaknya masih menganggap dana kelurahan sebatas wacana. Pasalnya hingga kini pihaknya belum tahu secara resmi mekanisme dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN itu.

Termasuk salah satunya soal PP serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dana tersebut. "Menurut saya itu (dana kelurahan) masih wacana, ya dilihat besok saja. Kalaupun itu terealisasi, harus dilihat dulu aturan juklak dan juknisnya," kata dia, Selasa (23/10).

Menurut Anif, selama ini kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Pengelolaan anggarannya pun dilakukan bersama kecamatan berdasarkan hasil musrenbang. "Kalau nanti akan ada anggaran untuk kelurahan, berarti anggaran dari Pusat [APBN]. Nah kami perlu tahu nanti aturan pelaksanaannya bagaimana," katanya.

Selama ini, pihak kelurahan menerima dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja, baik yang diberikan langsung oleh Pemkot maupun melalui kecamatan. Besarannya untuk 45 kelurahan dalam satu tahun bervariasi antara Rp500 juta hingga Rp1,1 miliar. "Dana tersebut kami alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk Terban dana dari APBD tidak digunakan untuk kegiatan fisik," katanya.

Senada, Lurah Pandeyan Sulamsi mengatakan katanya, segala persiapan harus dilakukan kelurahan jika PP terkait dana kelurahan sudah keluar. Salah satunya adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola dana kelurahan tersebut. "Kan SDM di kelurahan tersebut, hanya lima orang, itupun pejabat struktural tidak ada stafnya. Kami bahkan pernah hanya bertiga karena ada yang pensiun. SDM ini juga harus disiapkan karena dana yang dikelola tidak sedikit," kata Sulamsi.

Selama ini, kelurahan sudah mendapatkan dana dari Pemkot sebagai limpahan kewenangan. Dana tersebut lebih dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Lurah Tunggu...

Pandeyan misalnya, mengalokasikan dana pemberdayaan kepada masyarakat sekitar Rp250 juta untuk tahun ini. Adapun untuk kegiatan fisik, sepenuhnya diurus oleh kecamatan. "Seluruh program kerja mengacu pada hasil musrenbang dan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan). Sekarang tinggal menunggu bunyi PP-nya seperti apa," katanya. Sebelumnya, Kepala Bappeda Jogja

Edy Muhammad mengatakan dana kelurahan tersebut bisa membantu Pemkot untuk membangun masyarakat perkotaan. Dia menyebut jika 45 kelurahan di Kota Jogja selama ini sudah mendapatkan biaya operasional dari APBD Jogja. Masing-masing kelurahan mendapat alokasi berbeda, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah. "Jumlahnya per tahun antara Rp500 juta hingga Rp1,1 miliar," katanya.

Dana tersebut, lanjut Edy, belum termasuk dana yang dialokasikan dari pihak kecamatan untuk kelurahan. Belum termasuk dana hibah yang Pemkot berikan bagi Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang nilainya antara Rp90 juta hingga Rp150 juta. "Juga belum termasuk dana hibah untuk RT dan RW yang nilainya sekitar Rp130 juta. Kalau dikalikan

jumlah LPMK dan RT/RW nilainya juga besar," katanya.

Menurut Edy, rata-rata dalam satu tahun masing-masing kelurahan bisa memiliki dana operasional antara Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program pembangunan lingkungan, pemberdayaan perempuan, pendidikan anak (jam belajar), kesehatan, hingga pentas budaya. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005